

STEREOTIPE PEREMPUAN DALAM WACANA PEMBERITAAN PRA-PEMILU 2024 PADA MEDIA MASSA DARING

Faisal Kemal¹, Taufik Indarto²

Universitas Muhammadiyah AR Fachruddin¹, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka²
faisalkemal@unimar.ac.id¹, an.taufikindarto@gmail.com²

ABSTRAK

Perempuan berkiprah di dunia politik saat ini merupakan suatu hal yang jamak. Ihwal perempuan berpolitik tersebut seringkali menjadi lektur menarik dalam pemberitaan media massa. Stereotipe perempuan dalam pemberitaan media massa memiliki potensi untuk menguatkan sekaligus melemahkan kemampuan perempuan untuk menjadi pemimpin yang berhasil. Politisasi kodrat perempuan dapat memperburuk dan/atau memperlebar potensi untuk menghadapi tantangan politik. Kajian terhadap wacana politik perempuan dari sudut pandang linguistik telah banyak dilakukan karena objek tersebut penting untuk melihat sejauh mana representasi perempuan dalam penggambaran realitas sosial oleh media massa. Makalah ini mengkaji kecenderungan kuasa media dalam mewacanakan perempuan berpolitik yang difokuskan pada penggunaan bahasa dalam tata bahasa berdasarkan experiential meaning dan nilai ideologi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode untuk mengumpulkan dan menyaring data yang akan digunakan untuk penelitian. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan terhadap pemberitaan media massa daring mainstream dengan paradigma analisis bahasa (Halliday) dan analisis wacana kritis (Teun A. van Dijk). Data berupa struktur kalimat dianalisis menggunakan pisau analisis wacana kritis terhadap mikrostruktur, suprastruktur, dan makrostruktur dalam teks berita selama masa Pra-Pemilu 2024. Struktur mikro berkaitan dengan unsur kebahasaan, superstruktur berkaitan dengan struktur/skema teks, dan makrostruktur berkaitan dengan tema umum. Masa pra-pemilu 2024 atau kisaran tahun 2022—2023 menjadi tonggak awal yang penting karena dilakukannya tahapan pencalonan. Analisis tersebut akan mengungkap peran media massa dalam merepresentasikan peran gender terhadap pembaca (masyarakat). Itu juga dapat mendeskripsikan marginalisasi dan penggambaran perempuan dalam sektor pemerintahan, publik, atau politik dalam upaya persiapan Pra-Pemilu 2024.

Kata kunci: analisis wacana kritis, perempuan, politik, media massa

PENDAHULUAN

Ihwal kepemimpinan sebagian besar menjadi hak prerogatif laki-laki. Proposisi tersebut berlaku di berbagai bidang pekerjaan, mulai dari politik, ekonomi, militer, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya di masyarakat. Meskipun perempuan telah mendapatkan ruang dan akses yang lebih besar untuk berkontribusi, perempuan masih jarang mendapatkan tempat untuk menjadi pemimpin puncak. Hal tersebut membuat para aktivis perempuan berupaya keras untuk memperjuangkan representasi perempuan, khususnya dalam hal politik. Fokus utama dari yang mereka perjuangkan bermula dari rendahnya jumlah perempuan dalam jabatan terpilih. Padahal, komposisi keterpilihan perempuan akan berpengaruh pada keadilan demokrasi, legitimasi, daya tanggap, dan efektivitas atas kebijakan-kebijakan yang disusun (Childs & Krook, 2008).

Fakta yang terjadi adalah semakin banyak laporan dari seluruh dunia tentang upaya pelemahan terhadap perempuan, baik dalam bentuk fisik, intimidasi, maupun pelecehan yang ditujukan kepada politisi, penggerak, aktivis, maupun pemilih perempuan. Upaya pelemahan tersebut bertujuan untuk membatasi ruang partisipasi politik bagi perempuan, baik sebagai aktivis maupun pemilih. Tindakan tersebut merupakan sebuah ancaman negatif yang dapat merusak demokrasi. Selain itu, tindakan tersebut juga menjadi pertanyaan besar, apakah negara-negara di dunia telah benar-benar melibatkan perempuan sebagai aktor politik dengan penuh.

Upaya pelemahan terhadap perempuan dalam hal partisipasi politik bukanlah hal yang baru. Di beberapa bagian dunia, masyarakat mengasosiasikan laki-laki dengan “ranah publik”, sedangkan perempuan lekat dengan “ranah privat”. Pandangan tersebut membuat laki-laki mendapatkan ruang yang lebih besar dalam hal politik dan economy, sedangkan perempuan dianggap hanya mampu

menangani permasalahan rumah tangga dan keluarga. Bahkan, muncul pandangan bahwa perempuan dianggap sebagai pengacau dalam ruang politik, sehingga menimbulkan berbagai bentuk perlawanan terhadap pemimpin perempuan (Celis & Kantola, 2009; Eagly & Karau, 2002)

Isu tentang upaya pelemahan terhadap perempuan di dalam politik juga muncul di Indonesia beberapa waktu terakhir. Hal tersebut berkaitan dengan peraturan KPU tentang kuota caleg perempuan. KPU akan mengatur pembulatan ke bawah jika perhitungan 30 persen keterwakilan perempuan menghasilkan angka desimal kurang dari 0,5. Misalnya, jika di suatu dapil terdapat delapan kursi, jumlah 30 persen keterwakilan perempuannya adalah 2,4. Karena angka di belakang oma kurang dari 0,5, berlaku pembulatan ke bawah. Oleh karena itu, dari total 8 kursi di dapil cukup diisi oleh 2 orang dan sudah dianggap memenuhi syarat. Padahal, jika dihitung kembali, angka 2 setara dengan 25% saja, yang berarti belum memenuhi ambang minimal keterwakilan perempuan sebesar 30 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Rencana KPU tersebut menimbulkan berbagai respons dari masyarakat, khususnya para aktivis perempuan. Apa yang direncanakan KPU dinilai dapat mengurangi partisipasi perempuan Indonesia dalam berpolitik. Untuk mengungkap hal tersebut, penelitian ini akan menganalisis teks pemberitaan media massa daring Kompas.com tentang aturan kuota caleg perempuan pada pemilu tahun 2024. Analisis tersebut akan mengungkap bagaimana penggambaran stereotipe perempuan yang dibangun oleh Kompas.com. Analisis ini akan berpijak pada teori analisis wacana kritis model Van Dijk. Analisis wacana kritis model Van Dijk sering digunakan untuk membedah sebuah wacana karena dianggap praktis dalam penggunaannya (Yusar et al., 2020). Analisis model ini sering disebut sebagai analisis wacana kognisi sosial karena Van Dijk tidak hanya melihat struktur teksnya, tetapi juga melihat bagaimana sebuah wacana dapat terbentuk.

Ada tiga aspek yang difokuskan dalam analisis Van Dijk, yaitu struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial (Jufanny & Girsang, 2020). Analisis struktur teks meliputi analisis struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Lalu kognisi sosial sendiri meliputi pengetahuan (*knowledge*) serta opini dan sikap. Aspek terakhir konteks sosial yaitu meliputi konteks kultural dan situasi. Analisis wacana kritis model Van Dijk menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut menjadi satu kesatuan analisis. Suatu topik dari wacana dapat diungkap melalui bangunan teks: struktur teks dan strategi wacana. Sementara itu, pada tahap kognisi sosial, analisis difokuskan pada proses produksi teks informasi yang melibatkan kognisi penulis sebagai sebuah individu. Adapun analisis konteks sosial budaya mengkaji bangunan wacana yang dihubungkan dengan kondisi dan pandangan masyarakat terhadap suatu permasalahan yang memengaruhi kognisi penulis (Humaidi, 2017).

Sejalan dengan konsep tersebut, Eriyanto (2018) menjelaskan skema analisis wacana kritis model Van Dijk sebagai gabungan dari dimensi teks, kognisi sosia, dan konteks sosial. Inti dari analisis ini menggabungkan ketiga dimensi tersebut dalam sebuah kesatuan analisis. Dalam dimensi yang pertama, yaitu teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Kedua, kognisi sosial, proses produks teks yang melibatkan kognisi individu dipelajari. Ketiga, konteks sosial. Aspek ini mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat atas sebuah masalah.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mendalami deskripsi kritis pada kajian teks pemberitaan. Penelitian ini berkaitan dengan aspek kualitas, nilai, dan makna yang diungkapkan dan dijelaskan melalui analisis linguistik berupa bahasa atau kata-kata (Nisa, 2017). Data dalam penelitian ini adalah teks pemberitaan media massa daring Kompas.com tentang kuota caleg perempuan sebagai tahapan dari pra-pemilu 2024. Data berupa kata, frasa, kalimat, dan wacana dianalisis menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Van Dijk.

ANALISIS

Analisis wacana kritis menempatkan bahasa sebagai alat untuk mempersepsikan apa yang disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur. Pernyataan yang disampaikan tersebut berpotensi untuk bersifat ideologis secara sosial di masyarakat. Sifat ideologis tersebut tidak selalu bernilai negatif, tetapi juga dapat bernilai positif. Selain itu, bahasa dalam sudut pandang wacana kritis juga berfungsi

untuk mengonstruksi realitas sosial di dalam masyarakat sebagai sebuah representasi dari segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap sumber data, diperoleh temuan-temuan sebagai berikut.

Analisis teks

Analisis teks dalam kajian ini dilakukan untuk melihat bagaimana judul pemberitaan media massa daring Kompas.com tentang kuota caleg perempuan di DPR. Judul-judul tersebut dikutip dari laman berita Kompas.com sebagai berikut.

No.	Judul	Tanggal
1.	Pemerintah Klaim Dukung Keterwakilan Caleg Perempuan 30 Persen	13 Mei 2023
2.	Komnas Perempuan Sebut Peraturan KPU soal Caleg Perempuan Merugikan	12 Mei 2023
3.	Komisi II DPR Minta KPU Tak Ubah Aturan Keterwakilan Caleg Perempuan Minimal 30 Persen	17 Mei 2023
4.	KPU Konsultasi Lagi ke DPR dan Pemerintah soal Revisi Aturan yang bisa kurangi Caleg Perempuan	10 Mei 2023
5.	Perludem Minta KPU Tak Tersandera DPR Saat Revisi Aturan yang bisa kurangi Caleg Perempuan	11 Mei 2023

Berdasarkan data judul pemberitaan Kompas.com yang dikutip, terlihat bahwa Kompas.com mengangkat berita caleg perempuan secara signifikan selama 10—17 Mei 2023. Pada judul pemberitaan 1—4, Kompas.com memosisikan pihak pemerintah sebagai subjek di dalam kalimat dengan menyebutkan berbagai lembaga: Komnas Perempuan, Komisi II DPR, KPU, dan pemerintah itu sendiri. Hal itu dapat dinilai sebagai wujud pencitraan positif terhadap pemerintah yang mendukung penetapan kuota caleg perempuan minimal 30 persen. Sementara itu, pada judul pemberitaan 5, subjek yang digunakan adalah Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) yang memberikan dukungan dengan mendesak pemerintah (KPU) agar tidak tersandera DPR saat proses revisi aturan caleg perempuan.

Pemilihan subjek dalam judul pemberitaan tersebut bertujuan untuk menonjolkan peran pemerintah dalam mendukung kuota caleg perempuan. Temuan tersebut juga menunjukkan keberpihakan media terhadap pemerintah. Selain penempatan pemerintah sebagai subjek, penulisan judul berita tersebut juga menggunakan verba-verba yang menggambarkan dukungan terhadap seperti *klaim*, *sebut*, *tak ubah*, *konsultasi lagi*, *minta*. Verba-verba tersebut menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar mengupayakan dukungan terhadap perempuan dengan mempertahankan atau tidak mengurangi kuota caleg perempuan sebesar 30 persen.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perempuan diposisikan sebagai sosok penting untuk mengisi kursi legislatif. Kuota caleg perempuan sebesar 30 persen diperjuangkan oleh pihak-pihak terkait agar kuota tersebut tidak berkurang. Di dalam judul tersebut, muncul klausa *peraturan KPU soal Caleg Perempuan Merugikan*. Klausa tersebut menunjukkan bahwa pengurangan kuota caleg perempuan merupakan upaya yang berdampak buruk dan perlu dicegah. Posisi perempuan di dalam legislatif dinilai penting untuk menempati peran-peran strategis di berbagai bidang. Media juga menggunakan klausa *tak tersandera* yang menunjukkan bahwa KPU perlu bersikap independen dalam memperjuangkan kuota caleg perempuan. KPU dinilai menjadi ujung tombak dalam proses revisi peraturan yang berpotensi merugikan kuota caleg perempuan. Di sisi lain, judul-judul tersebut juga menunjukkan bahwa posisi perempuan masih lemah dalam hal besaran kuota caleg. Pemberitaan yang ditampilkan Kompas.com menggambarkan potensi pengurangan kuota caleg perempuan. Pengurangan kuota tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk melemahkan posisi perempuan di dalam legislatif. Pengurangan wakil perempuan menggambarkan bahwa perempuan dipandang sebelah mata untuk mengisi kursi legislatif.

Upaya pemerintah dalam mempertahankan kuota ideal untuk caleg perempuan dapat dilihat dalam kutipan berikut.

1. Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menyatakan, pemerintah **berkomitmen mendukung** pemenuhan keterwakilan 30 persen calon anggota legislatif (caleg) perempuan.

2. Jaleswari melanjutkan, pemerintah juga **mendukung** Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
3. Komnas HAM juga akan terus **melakukan pemantauan** terkait janji revisi yang disampaikan KPU kepada Komnas Perempuan.

Berdasarkan kutipan pemberitaan tersebut, tergambar muncul rencana pengurangan kuota caleg perempuan karena sistem pembulatan ke bawah. KPU akan mengatur pembulatan ke bawah jika perhitungan 30 persen keterwakilan perempuan menghasilkan angka desimal kurang dari 0,5. Misalnya, jika di suatu dapil terdapat delapan kursi, jumlah 30 persen keterwakilan perempuannya adalah 2,4. Karena angka di belakang oma kurang dari 0,5, berlaku pembulatan ke bawah. Oleh karena itu, dari total 8 kursi di dapil cukup diisi oleh 2 orang dan sudah dianggap memenuhi syarat. Padahal, jika dihitung kembali, angka 2 setara dengan 25% saja, yang berarti belum memenuhi ambang minimal keterwakilan perempuan sebesar 30 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Rencana KPU tersebut dinilai tidak memihak perempuan dalam hal kesempatan berpolitik. Sementara itu, Kompas.com dalam pemberitaannya terlihat menunjukkan sikap pemerintah yang mengupayakan agar kuota caleg perempuan tetap bisa mencapai 30 persen. Dalam konteks pemberitaan tersebut, perempuan telah mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam hal berpolitik. Apa yang diberitakan oleh Kompas.com menunjukkan bahwa kesempatan perempuan dalam berpolitik didukung penuh oleh pemerintah melalui beberapa lembaga/instansi terkait. Komnas HAM disebutkan juga akan terus melakukan pemantauan untuk memastikan kuota caleg perempuan sebesar 30 persen tidak berubah atau berkurang.

Beberapa waktu terakhir, kontribusi perempuan di kancah politik dianggap telah mengalami kemajuan di seluruh dunia (Krook, 2017). Di Indonesia, kehadiran dan partisipasi perempuan di dalam bidang politik telah mengalami peningkatan di parlemen, memiliki ruang yang luas untuk menjadi aktivis sosial dan politik, serta mendapatkan pengakuan sebagai pemengaruh dalam hal keputusan memilih. Banyak pihak yang menyambut kondisi positif tersebut dengan memberikan perhatian yang lebih kompleks terhadap berbagai kebijakan yang bermanfaat dan berpihak pada perempuan. Pihak-pihak tersebut juga berusaha membangun regulasi yang dapat menginspirasi minat dan keterlibatan perempuan secara lebih besar di dalam politik untuk mengikis asosiasi histori antara laki-laki dan perempuan di dalam politik.

Analisis Kognisi Sosial

Analisis kognisi sosial berkaitan dengan pengungkapan makna yang samar dari sebuah teks. Pemberitaan yang disuguhkan oleh media seringkali menjadi alat untuk mempropagandakan sesuatu yang disembunyikan melalui permainan bahasa. Teks berita yang disajikan oleh Kompas.com tentang kuota caleg perempuan menunjukkan bahwa saat ini, kedudukan perempuan di dalam dunia politik masih kurang kuat. Posisi perempuan di dalam politik masih dapat digeser atau digoyahkan oleh kepentingan lainnya. Pengurangan kuota caleg perempuan menjadi di bawah 30 persen menunjukkan bahwa suhu politik di Indonesia tidak menginginkan adanya keterwakilan yang kuat dari perempuan. Media massa sebagai pemegang peranan penting dalam sistem demokrasi di Indonesia hadir untuk mengawal isu-isu politik, salah satunya tentang kesempatan atau partisipasi perempuan. Media massa memiliki peran besar dalam mengembangkan dan menyebarluaskan wacana dan peristiwa internasional. Isu, wacana dan peristiwa yang berkembang atau terjadi di sebuah negara dengan cepat akan menyebar ke negara-negara lain berkat pemberitaan media massa (Basit et al., 2022). Oleh karena itu, Kompas.com membangun wacana pemberitaan secara masif tentang upaya pemertahanan kuota caleg perempuan sebesar 30 persen. Pemberitaan yang diproduksi berturut-turut selama beberapa hari merupakan bentuk dukungan terhadap upaya yang akan, sedang, dan telah dilakukan oleh pemerintah.

Pemroduksian berita oleh Kompas.com tentang kuota caleg perempuan tersebut bukan pertama kalinya. Sebelumnya, isu perempuan yang diekspos media massa dengan sangat masif juga berkaitan dengan posisi perempuan yang masih terpinggirkan di bidang politik. Isu tersebut mendapat perhatian dari berbagai surat kabar, terutama menjelang pemilu tahun 2004 dan kembali berulang

pada tahun 2009 ketika kuota keterwakilan perempuan ramai disuarakan oleh para aktivis perempuan. Isu lain yang juga banyak diangkat media massa adalah kekerasan terhadap perempuan. Isu ini mendapat perhatian media massa, baik media cetak maupun elektronik karena semakin banyak fenomena kekerasan terhadap perempuan yang terungkap di tengah gencarnya kampanye antikekerasan terhadap perempuan (Dewi, 2009).

Sementara itu, dalam konteks pemberitaan isu perempuan pada pra-pemilu 2024 ini, Kompas.com berfokus pada upaya pemerintah untuk mempertahankan sistematisa penghitungan kuota 30 persen untuk caleg perempuan. Itu dilakukan Kompas.com dengan menonjolkan atau mencitrakan hal-hal positif yang berupa dukungan-dukungan dari pemerintah, baik dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lembaga terkait lainnya. Kompas ingin menunjukkan bahwa isu tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah untuk mewujudkan partisipasi positif perempuan di dalam dinamika politik di Indonesia.

Analisis Sosial

Analisis sosial bertujuan untuk mengungkap bagaimana hubungan antara teks pemberitaan media dan struktur sosial masyarakat serta pengetahuan yang dipahami dan berkembang di masyarakat. Potret perempuan menjadi sesuatu yang potensial bagi media massa untuk diidentifikasi, dicitrakan, dan dimanifestasikan melalui pemberitaan. Hal tersebut dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan dan kemajuan kaum perempuan itu sendiri, termasuk dalam hal kontribusi perempuan di dalam politik.

Hubungan gender di dalam masyarakat bergantung pada nilai budaya yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Sementara itu, di Indonesia, masih ada pandangan tentang peran perempuan sebagai pemegang sektor domestik pengelola rumah tangga. Konsep tersebut menyebabkan beban yang ditanggung perempuan di dalam sebuah rumah tangga menjadi sangat berat. Karakteristik perempuan dinilai khas dan identik: berkebalikan dengan apa yang dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki dinilai rasional, logis, mandiri, dan objektif, sedangkan perempuan memiliki keseluruhan yang berlawanan dengan karakter-karakter tersebut. Penggambaran dan pandangan tentang stereotipe perempuan menyebabkan pelabelan negatif bagi perempuan: bentuk kelemahan, keputusasaan, kesubjektifan, dan ketergantungan. Hal itu membuat perempuan harus berupaya dengan sangat keras agar menghilangkan stigma tersebut.

Sementara itu, di dalam bidang politik, perempuan dan politik tidak lepas dari *image* dan konstruksi sosial perempuan dalam relasi masyarakat. Pandangan yang selama ini jamak terjadi adalah bahwa perempuan “tidak layak” menjadi pemimpin karena perempuan sulit untuk berpikir rasional dan lebih mengandalkan emosinya. Pandangan tersebut membuat pihak-pihak tertentu mudah menemukan celah untuk “melemahkan” perempuan. Pandangan tersebut juga menyebabkan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik menjadi semakin kecil. Sementara itu, pandangan lain yang tidak kalah kuat adalah bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang kesemuanya itu diasumsikan milik laki-laki, bukan milik perempuan. Perempuan tidak pantas berpolitik karena perempuan adalah “penghuni” dapur/domestik, tidak bisa berpikir rasional dan kurang berani mengambil risiko, yang kesemuanya itu sudah menjadi stereotipe perempuan. Akibatnya, baik perempuan atau laki-laki dan masyarakat secara umum, sudah menarik kutub yang berbeda bahwa dunia publik milik laki-laki dan dunia domestik milik perempuan. Hal ini juga berkaitan dengan sosialisasi peran gender (Pudji, 2008).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap teks pemberitaan Kompas, dapat disimpulkan bahwa stereotipe perempuan di dalam kancah politik di Indonesia masih lemah. Itu ditunjukkan oleh adanya rencana pengurangan kuota caleg perempuan karena skema pembulatan ke bawah. Hal tersebut menjadi isu yang diperhatikan oleh pemerintah karena pemerintah mengupayakan audiensi, revisi, dan sebagainya agar peraturan kuota caleg tidak merugikan perempuan. Penggambaran perempuan berpolitik dalam berita tersebut ditunjukkan oleh penggunaan kata-kata di dalam teks berita. Apa yang menjadi fokus berita berupa rencana pengurangan kuota caleg perempuan cukup relevan dengan praktik sosial budaya yang berlaku di masyarakat. Perempuan, khususnya dalam berpolitik masih “kalah” jika

dibandingkan dengan laki-laki. Hal itu disebabkan oleh pandangan bahwa perempuan memiliki karakter khusus yang tidak sepadan dengan apa yang dimiliki laki-laki, sehingga masyarakat merasa bahwa pemimpin perempuan akan cenderung kurang rasional dan tidak objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Basit, L., Kholil, S., & Sazali, H. (2022). Perspektif Media Massa Terhadap Politisi Perempuan Dalam Tiap Rezim Negara Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(01), 975–1006. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2320>
- Celis, K., & Kantola, J. (2009). *Constituting Women's Interests through Representative Claims*.
- Childs, S., & Krook, M. L. (2008). Critical mass theory and women's political representation. *Political Studies*, 56(3), 725–736. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2007.00712.x>
- Dewi, M. astuti. (2009). Media massa dan penyebaran isu perempuan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 228–236.
- Eagly, A. H., & Karau, S. J. (2002). Role congruity theory of prejudice toward female leaders. *Psychological Review*, 109(3), 573–598. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.109.3.573>
- Eriyanto. (2018). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. LKiS Yogyakarta.
- Humaidi, A. (2017). Struktur Teks, Kognisi Sosial, dan Dimensi Sosial Pidato Susilo Bambang Yudhoyono (Text Structure, Social Cognition, and Social Dimension Susilo Bambang Yudhoyono's Speech). *Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya*, 6(1), 115. <https://doi.org/10.20527/jbsp.v6i1.3744>
- Jufanny, D., & Girsang, L. R. M. (2020). Toxic Masculinity Dalam Sistem Patriarki (Analisis Wacana Kritis Van Dijk Dalam Film “Posesif”). *Jurnal Semiotika*, 14(1), 8–23.
- Krook, M. L. (2017). Violence against women in politics. In *Journal of Democracy* (Vol. 28, Issue 1, pp. 74–88). Johns Hopkins University Press. <https://doi.org/10.1353/jod.2017.0007>
- Nisa, K. (2017). Analisis Wacana Kritis (Teori Van Dijk Dalam Kajian Teks Media Massa Pada E-Paper Analisa Medan Rubrik Surat Pembaca). *Jurnal Dialog*, VI(II), 557–564.
- Pudji, T. M. (2008). Citra Perempuan Dalam Politik. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 3(1), 3–16. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v3i1.183>
- Yusar, F., Sukarelawati, S., & Agustini, A. (2020). Kognisi Sosial Dalam Proses Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk Pada Buku Motivasi. *Jurnal Komunikatio*, 6(2), 65–76. <https://doi.org/10.30997/jk.v6i2.2876>